

Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Etika Politik

Fajar Wahyudi¹, Ratna Endang Widuatie², Abelia Ramadhani³, Moch. Diky Dermawan⁴, Adithya Fahriza Pratama⁵, Indah Lestari⁶

¹ Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Jember dan fajarwahyudi6705@gmail.com

³ Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Jember dan abeliaramadhani392@gmail.com

⁴ Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Jember dan dermawandiky23@gmail.com

⁵ Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Jember dan fahrizaadith@gmail.com

⁶ Pendidikan Luar Sekolah, FKIP, Universitas Jember dan indahmei2026@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai landasan dalam bertindak, etika politik sudah seharusnya diterapkan oleh pemerintah dalam semua kebijakan yang diambil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan unggulan yang diusung oleh Presiden ke-8 Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagai upaya penanganan stunting dan peningkatan gizi anak usia sekolah. Artikel ini akan menganalisis kebijakan program MBG melalui perspektif etika politik berbasis nilai-nilai Pancasila, dengan metode kajian literatur dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, program ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Namun, tantangan seperti 17 kasus keracunan makanan, distribusi dana yang timpang, dan minimnya transparansi menunjukkan pelanggaran terhadap sila kemanusiaan dan kerakyatan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pengawasan keamanan pangan, platform digital untuk transparansi, dan dewan pengawas komunitas untuk partisipasi masyarakat. penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai tujuan awalnya.

Kata Kunci: Program, Makanan Bergizi Gratis, Etika Politik, Nilai-Nilai Pancasila, Indonesia

ABSTRACT

As a basis for action, political ethics should be applied by the government in all policies taken. The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the flagship policies promoted by Indonesia's 8th President, Mr. Prabowo Subianto, as an effort to tackle stunting and improve nutrition for school-age children. This article will analyze the MBG program policy through the perspective of political ethics based on Pancasila values, using literature review and normative analysis methods. The results show that in principle, the program is in line with the values of Pancasila, particularly social justice, fair and civilized humanity, and Indonesian unity. However, challenges such as 17 cases of food poisoning, unequal distribution of funds, and lack of transparency indicate a violation of the precepts of humanity and populism. These findings indicate the importance of food safety supervision, digital platforms for transparency, and community supervisory boards for community participation. strengthening supervisory mechanisms and community participation to ensure the program is effective and sustainable according to its original objectives.

Keywords: Program, Free Nutritious Food, Political Ethics, Pancasila Values, Indonesia

PENDAHULUAN

Etika politik menjadi pilar krusial dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat, terutama di tengah tantangan kebijakan publik seperti korupsi dan ketimpangan distribusi sumber daya. Menurut Hadi Tri et al. (2021), etika politik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku politik individu dan institusi, memastikan pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, etika politik

berbasis Pancasila menuntut agar semua kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada kelima sila, seperti halnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan yang dijanjikan pada saat kampanye calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Program makan bergizi gratis adalah rencana pemberian makan bergizi di sekolah ataupun pesantren untuk memperbaiki gizi para pelajar (Sitanggang dkk., 2024). Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025, dan menargetkan 19,47 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini hadir sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam upaya untuk mengurangi angka stunting di Indonesia yang sebanyak 21,6% pada tahun 2022. Selain itu, program ini juga sebagai langkah awal pemerintah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Latar belakang diadakannya Program makan bergizi gratis menurut Prabowo Subianto adalah bahwa 25% anak di Indonesia tidak mampu mendapatkan makanan bergizi setiap hari yang memperparah kelaparan dan stunting. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendukung strategi nasional Percepatan Penurunan Stunting (PPS), yang menargetkan penurunan stunting dari 21,6% (2022) ke 14% (2024), dengan fokus pada peningkatan asupan gizi anak (CISDI, 2024). Sejalan dengan standar global FAO School Food and Nutrition (2022), MBG bertujuan memastikan akses pangan bergizi, yang mencerminkan keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan tanggung jawab moral pemerintah untuk melindungi martabat anak sesuai dengan sila kemanusiaan. Selain itu, program MBG ini juga dapat memperkuat ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan petani lokal di 599 dapur, sehingga menciptakan 90,000 lapangan kerja baru. (Setneg.go.id, 2025).

Dari perspektif etika politik, implementasi MBG menguji komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial (sila kelima) dan kemanusiaan (sila kedua) Pancasila. Sebanyak 17 kasus keracunan makanan, seperti di Bogor yang memengaruhi 223 siswa akibat bakteri *Salmonella*, menunjukkan kegagalan menjaga martabat anak (En.tempo.co, 2025). Minimnya transparansi anggaran juga memicu risiko politisasi, menantang prinsip akuntabilitas etika politik. Tantangan ini menegaskan perlunya analisis mendalam terhadap pelaksanaan MBG. Artikel ini menganalisis MBG dari perspektif etika politik Pancasila, mengevaluasi keselarasannya dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemanusiaan, serta merekomendasikan perbaikan untuk memastikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Systematic Literature Review (SLR) adalah metode tinjauan literatur dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia untuk digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan metode ini penulis melakukan tinjauan dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara terstruktur yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini et al, 2019). Proses pengumpulan artikel digunakan untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan akurat. Langkah pertama adalah menetapkan masalah, yaitu tahap mengidentifikasi dan menemukan masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Langkah kedua adalah mencari sumber jurnal dan artikel yang relevan melalui database jurnal, berita, dan undang-undang menggunakan beberapa database, antara lain Pubmed, Science Dierect, dan Google Schoolar, Wos, Scopus. Langkah ketiga adalah mencari artikel yang relevan dan

mendiskusikan informasi yang diperoleh dapat atau tidaknya dijadikan sebagai bahan penelitian. Langkah keempat terkait persyaratan kualifikasi adalah mengulas kualitas metode SLR. Bagian akhir adalah pembahasan hasil analisis logis, kesimpulan atau uraian singkat, yang meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat penyusunan artikel berhipotesis dan memahami hasil ringkasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keselarasan dengan Pancasila

Sebagai salah satu kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

1. **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Program ini menunjukkan kepedulian moral terhadap gizi anak, sejalan dengan kasih sayang agama. Namun, dalam implementasinya mengalami tantangan seperti kasus keracunan di beberapa sekolah, hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga makanan halal dan menyehatkan.
2. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Program MBG direncanakan untuk menargetkan kelompok rentan, dengan tujuan mengurangi stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan hak atas gizi yang layak. Tetapi 17 kasus keracunan, seperti di Bogor (223 siswa terkena bakteri *Salmonella*), mencerminkan pelanggaran martabat manusia (En.tempo.co).
3. **Persatuan Indonesia:** Program MBG diperkirakan akan melibatkan UMKM dan petani di 599 dapur, seperti di Jayapura dan Sukamiskin, hal ini memperkuat kolaborasi lokal dan mencerminkan semangat persatuan (Kemenkopmk.go.id).
4. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:** Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai kebijakan pro-rakyat untuk memastikan akses gizi bagi anak-anak Indonesia dan kelompok rentan. Namun, laporan awal menunjukkan bahwa dari target 3 juta penerima manfaat pada tahap pertama pelaksanaan di Januari 2025, hanya 600.000 yang tercapai, atau sekitar 20% dari rencana awal (BBC News Indonesia, 2025). Kesenjangan ini mencerminkan perencanaan yang tergesa-gesa dan kurangnya koordinasi antar instansi, yang bertentangan dengan prinsip hikmat kebijaksanaan yang menuntut musyawarah matang dan pelaksanaan yang cermat.
5. **Keadilan Sosial:** Program MBG dirancang untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi anak-anak Indonesia, sehingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaan awal justru 70% anggaran MBG senilai Rp71 triliun terserap di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya menerima 10% alokasi, jauh dari kebutuhan untuk menjangkau kelompok rentan di wilayah terpencil (Ombudsman RI, 2025)

B. Keadilan Distributif

Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan distributif mengharuskan negara mengalokasikan sumber daya secara adil, dengan mengutamakan kelompok termiskin dan kurang beruntung melalui prinsip perbedaan atau *difference principle* (Faiz, 2009). Namun, laporan awal menunjukkan bahwa 70% anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terserap di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya menerima 10% alokasi,

dan hanya 20% dari 599 dapur MBG berlokasi di wilayah terpencil. Ketimpangan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan distributif, karena program MBG tidak memprioritaskan kelompok paling rentan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip Rawls, sehingga berpotensi memperburuk ketidakadilan dan ketegangan sosial.

C. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam perspektif etika politik, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Transparansi mencakup kejelasan informasi terkait sumber dan penggunaan dana, serta proses penyaluran makanan. Sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pengawasan yang efektif, baik melalui audit keuangan maupun keterlibatan lembaga anti-korupsi seperti KPK, untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan manfaat program tepat sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya, MBG menghadapi tantangan serius yang melemahkan kedua pilar ini. Kurangnya platform publik untuk melacak penggunaan anggaran memicu kecurigaan penyalahgunaan, sebagaimana dilaporkan oleh Ombudsman RI (2025), yang juga mencatat munculnya broker yang memanfaatkan kontrak distribusi makanan, tanpa sanksi tegas bagi pelaku kelalaian (En.tempo.co). Lemahnya pengawasan keamanan pangan semakin memperparah masalah, dengan hanya 30% dari 599 dapur MBG yang diaudit oleh BPOM hingga Maret 2025, sehingga menyebabkan 17 kasus keracunan makanan, termasuk insiden di Bogor yang berdampak pada 223 siswa akibat bakteri *Salmonella* (En.tempo.co).

D. Efektivitas Program

Program MBG berfokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat atas pangan bergizi, terutama untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil, yang merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. MBG memiliki potensi besar, dengan studi literatur menunjukkan program serupa di Brazil yg efektif untuk menurunkan stunting. Menurut UNESCO dan WFP (World Food Programme) program makan gratis dapat meningkatkan kehadiran siswa hingga 9-15% di sekolah (KepriDays.co.id). Namun, dalam pelaksanaan MBG di Indonesia mengalami insiden keracunan dan disparitas distribusi menghambat efektivitas. Evaluasi berkala oleh pemerintah dan LSM diperlukan untuk memastikan kualitas makanan dan dampak gizi.

E. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pelibatan komunitas lokal, termasuk UMKM, dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus memastikan program lebih tepat sasaran. Namun, saat ini mekanisme formal partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan MBG masih terbatas. Meningkatkan keterlibatan masyarakat akan memperkuat legitimasi, monitoring, dan efektivitas program.

F. Implikasi Etika Politik

Dari perspektif etika politik, MBG merupakan bentuk tanggung jawab atas mandat politik dari pemerintah terpilih, khususnya sebagai respons atas janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, sekaligus perwujudan hak dasar masyarakat atas pangan dan gizi. Pelaksanaan program harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta partisipasi masyarakat agar tidak menjadi alat politisasi. Tantangan utama dari program ini meliputi keberlanjutan

pendanaan, risiko politisasi, dan perlunya distribusi yang benar-benar adil agar manfaat program tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Beberapa kasus seperti keracunan di beberapa sekolah dan keterlibatan TNI dalam menyediakan 599 lokasi dapur, serta kebutuhan anggaran yang besar sehingga dapat mempengaruhi fisik, hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat. (BBC.com) Implikasi etika politik muncul ketika terdapat kesenjangan antara janji politik dan realisasi kebijakan. Dengan banyaknya tantangan dan masalah, implementasi MBG hingga saat ini dinilai tidak sesuai harapan masyarakat, hal ini menimbulkan penurunan kepercayaan terhadap wakil rakyat, dan mandat politik menjadi tidak bermakna secara substantif.

KESIMPULAN

Program makanan bergizi gratis mencerminkan kepedulian moral negara terhadap pemenuhan hak dasar warga, khususnya kelompok rentan, atas akses pangan yang layak, dengan potensi mengurangi stunting dan meningkatkan SDM untuk Indonesia Emas 2045. Secara etis, program ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan pengentasan kemiskinan. Namun, kegagalan implementasi, seperti kasus keracunan dan lemahnya pengawasan, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, integritas, dan akuntabilitas. Pemerintah perlu segera memperbaiki tata kelola dan pengawasan agar program ini tidak hanya mencerminkan nilai Pancasila di atas kertas, tetapi juga di lapangan.

Masyarakat diharapkan menggunakan program makanan bergizi gratis secara bijak dan sesuai kebutuhan, tanpa penyalahgunaan yang bisa merugikan pihak lain. Selain itu, penting untuk ikut terus mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan jika ada penyimpangan, seperti korupsi atau politisasi. Menjaga netralitas program juga menjadi tanggung jawab bersama, agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kelancaran dan pengawasan program akan membantu memastikan manfaatnya tetap dirasakan secara adil dan merata.

REFERENSI

- Andin, Afifah, et al. "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis." *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3.1 (2024): 370-383.
- BBC News, (2025, Januari 6) Makan bergizi gratis perdana sasar 600 ribu orang, jauh dari target awal - Apakah program ini terlalu tergesa-gesa?. BBC.com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ywwv21708o>
- CISDI. (2024). Menakar kesiapan program makan bergizi gratis: Pembelajaran dari India dan China. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives.
- Desiani, R., & Syafiq, M. (2025). Efektivitas program makan gratis pada status gizi siswa sekolah dasar: Studi literatur. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 44–51.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009): 135-149.
- Hadi Tri, et. Al. (2021). Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika dan Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Al-Aqidah*. Vol. 12. No. 2.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112.
- Kiftiyah, S., Widayati, W., & Mufidah, R. (2025). Program makan gratis dari perspektif keadilan sosial. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(1), 23–35.

- Kemenkopmk (2024, November 21) Program Makan Bergizi Gratis Untuk Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia. <https://www.kemenkopmk.go.id/program-makan-bergizi-gratis-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm-indonesia>
- Kepridays.go.id. (2025, April 27). DAMPAK POSITIF PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) TERHADAP GIZI ANAK DAN KUALITAS PENDIDIKAN. Kepridays.go.i. <https://kepridays.co.id/2025/04/27/dampak-positif-program-makan-bergizi-gratis-mbg-terhadap-gizi-anak-dan-kualitas-pendidikan/>
- Latif, Azhar, M. (2024). Pengertian Etika Politik Serta Pendapat Ibnu Taimiyah. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol.4 No. 1.
- Putri, F. R., & Suharso, A. (2023). Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi. *INFOTECH journal*, 9(2), 377-382.
- Pratiwi, D. A., Harahap, Y., & Kartika, A. (2025). Program makan bergizi gratis dalam perspektif mandat politik Hanna Pitkin. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 55–70.
- Qomarrullah, R., Nurdin, M., & Azis, A. (2025). Implementasi program makan bergizi gratis sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 14–26.
- Sitanggang, Altolyto, Yuyun Umaidah, and Riza Ibnu Adam. "Analisis sentimen masyarakat terhadap program makan siang gratis pada media sosial X menggunakan algoritma Naïve Bayes." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 12.3 (2024).
- Sapto Yunus, (2025, Mei 15) Ombudsman Finds Indonesian Govt Unprepared in Managing Free Nutritious Meal Program. En.tempo.co. <https://en.tempo.co/read/2007330/ombudsman-finds-indonesian-govt-unprepared-in-managing-free-nutritious-meal-programtar>
- Setneg.go.id (2024, Desember 18) Makan Bergizi Gratis dan SDM Unggul. Setneg.go.id. https://www.setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul